

Dari Instruksi Ke Dialog: Analisis Keterlibatan Masyarakat Dalam Wacana Kebijakan Pertanian Di Ruang Digital

From Instruction to Dialogue: An Analysis of Public Engagement in Agricultural Policy Discourse in the Digital Space

Hamiruddin Udu¹, Hidrawati^{2*}

¹Department of English Language Education, Faculty of Teacher Training and Education, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia

^{2*}Department of Agribusiness, Faculty of Agriculture, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia

*Email korespondensi: hidrawati@uho.ac.id

ABSTRACT

The claim that digital transformation fosters more participatory policy communication is tested through a case study in Southeast Sulawesi Province, Indonesia. This mixed-methods research integrates Critical Discourse Analysis of official government discourse with sentiment and thematic analysis of 2,845 public responses from digital platforms. The results indicate that although public engagement is high, the resulting interaction patterns do not lead to substantive policy dialogue. Official discourse is dominated by technocratic, populist, and food sovereignty framing, while public responses are divided into themes of implementation criticism, appreciation, suggestions, and skepticism. The key finding reveals a gap between engagement and policy influence, where digital spaces more often function as a means of legitimization and reinforcement of one-way communication. This study introduces the concept of ‘selective absorption’ as a mechanism explaining why public input of a technical-operational nature is more easily absorbed, while structural criticism tends to be disregarded. Selective absorption is a mechanism for filtering public input that prioritizes technical-operational feedback aligned with the government’s developmental narrative, while disregarding structural criticism that could disrupt existing hierarchies and policy paradigms. The research contributes to digital governance discourse by highlighting participation dynamics in Eastern Indonesia.

Keywords: Agricultural, Critical Discourse Analysis, Digital, Participation, Policy

ABSTRAK

Klaim bahwa transformasi digital mendorong komunikasi kebijakan yang lebih partisipatif diuji melalui studi kasus di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian metode campuran ini mengintegrasikan Analisis Wacana Kritis terhadap wacana resmi pemerintah dengan analisis sentimen dan tematik terhadap 2.845 respons publik di platform digital. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan publik tinggi, pola interaksi yang terbentuk tidak menghasilkan dialog kebijakan yang substantif. Wacana resmi didominasi framing teknokratis, populis, dan kedaulatan pangan, sementara respons publik terpilah dalam kritik implementasi, apresiasi, saran, dan skeptisisme. Temuan kunci mengungkap kesenjangan antara engagement yang tinggi dan pengaruh kebijakan yang rendah, di mana ruang digital lebih berfungsi sebagai sarana legitimasi dan penguatan komunikasi satu arah. Penelitian ini memperkenalkan konsep ‘absorpsi selektif’ sebagai mekanisme yang menjelaskan mengapa masukan publik teknis-operasional lebih mudah diserap, sementara kritik struktural diabaikan. Absorpsi selektif adalah mekanisme penyaringan masukan publik yang memprioritaskan umpan balik teknis-operasional yang selaras dengan narasi pembangunan pemerintah, dan mengabaikan kritik struktural yang berpotensi mengganggu hierarki dan paradigma kebijakan yang berlaku. Kontribusi studi terletak pada wacana tata kelola digital dengan menyoroti dinamika partisipasi di Indonesia Timur.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Digital, Kebijakan, Partisipasi, Pertanian

PENDAHULUAN

Di era digital kontemporer, platform media sosial telah merekonfigurasi lanskap komunikasi politik dan kebijakan publik secara global. Terdapat dua perspektif teoritis utama yang mendominasi wacana ini. Di satu sisi, para optimis seperti Chadwick (2017) dan Mergel (2013) melihat adanya pergeseran dari model komunikasi top-down yang tradisional dan direktif menuju model yang lebih partisipatif dan dialogis, di mana ruang digital bertransformasi menjadi agora modern. Dalam ruang publik baru ini, warga negara tidak lagi dipandang sebagai penerima pasif, melainkan sebagai produsen opini aktif yang terlibat dalam respons, kritik, dan negosiasi kebijakan (Graham et al., 2015; Svensson et al., 2015). Perspektif ini menjanjikan terealisasinya digital governance yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Namun, di sisi lain, para teoritis kritis seperti Fuchs (2014) dan van Dijck (2013) menawarkan narasi yang lebih pesimistis. Mereka berargumen bahwa ruang digital justru sering kali menjadi alat untuk memperkuat hierarki dan ketimpangan yang sudah ada (digital reinforcement). Alih-alih mendorong demokratisasi, logika platform dapat mengabadikan partisipasi kosmetik (cosmetic participation), di mana keterlibatan publik yang tinggi hanya menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan tanpa disertai transformasi kebijakan yang substantif. Debat teoritis antara optimisme digital democratization dan pesimisme digital reinforcement inilah yang menjadi poros utama penelitian ini.

Di Indonesia, konteks ini memiliki resonansi yang khusus. Pasca Reformasi 1998 dan diperkuat dengan pesatnya penetrasi internet serta media sosial, tuntutan terhadap pemerintahan yang terbuka dan responsif semakin mengemuka (Lim, 2017; Warburton & Aspinall, 2019). UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan inisiatif e-government menjadi landasan hukum dan teknis bagi terciptanya interaksi yang lebih setara antara negara dan warganya. Sektor pertanian, sebagai pilar fundamental ketahanan nasional dan penyerap tenaga kerja terbesar, menjadi salah satu sektor dimana dialog kebijakan ini sangat krusial sekaligus menjadi medan yang ideal untuk menguji debat teoritis tersebut.

Komunikasi kebijakan pertanian memiliki karakteristik yang unik dan kompleks. Kebijakan di sektor ini seringkali teknis, berdampak langsung pada mata pencaharian, dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal (Chib, 2017). Literatur internasional telah banyak mengkaji partisipasi digital dalam berbagai sektor, namun fokus pada sektor pertanian di negara berkembang masih relatif terbatas (Klerkx et al., 2019; Eastwood et al., 2019). Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada adopsi teknologi pertanian (*digital farming*) atau penyebaran informasi, bukan pada proses dialogis dan negosiasi makna kebijakan antara pemerintah dan publik (Bronson & Knezevic, 2016; Jakku et al., 2019).

Meskipun kajian mengenai *e-government* dan penggunaan media sosial dalam komunikasi politik di Indonesia terus berkembang (Sutanto et al., 2021; Nurfadillah et al., 2022), masih terdapat sejumlah kesenjangan penelitian yang signifikan. Pertama, terdapat kesenjangan regional karena sebagian besar penelitian berfokus pada pemerintah pusat atau wilayah Jawa-Bali, sementara dinamika komunikasi kebijakan di kawasan Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Tenggara yang memiliki karakteristik agraris, sosial, dan digital yang khas, masih minim mendapat perhatian (Taufiqurrahman, 2020). Kedua, terdapat kesenjangan metodologis karena sebagian besar studi hanya menganalisis wacana kebijakan dari perspektif pemerintah atau respons publik secara terpisah. Penelitian yang mengintegrasikan analisis wacana kebijakan resmi (*directive*

discourse) dengan analisis tematik dan sentimen respons publik (*dialogue discourse*) dalam satu kerangka analisis yang utuh masih sangat terbatas (Thelwall, 2017). Ketiga, terdapat kesenjangan teoritis-empiris, yaitu belum tersedianya bukti empiris yang memadai mengenai sejauh mana ruang digital benar-benar mampu menciptakan keterlibatan publik yang bermakna, meskipun secara teoritis media digital sering diklaim sebagai sarana demokratisasi dan partisipasi publik.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini hadir untuk menguji ketegangan antara dua pandangan yang saling berlawanan, yakni ruang digital sebagai instrumen demokratisasi kebijakan dan ruang digital sebagai mekanisme baru yang justru memperkuat hierarki komunikasi satu arah (*digital reinforcement*). Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana interaksi antara wacana kebijakan pertanian yang dikomunikasikan secara *top-down* oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan respons masyarakat di ruang digital, serta sejauh mana interaksi tersebut merepresentasikan dialog yang bermakna atau sekadar mereproduksi pola komunikasi instruktif yang telah ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam mengisi kekosongan akademik secara teoritis dan metodologis, tetapi juga memberikan bukti empiris yang kontekstual mengenai dinamika keterlibatan masyarakat dalam wacana kebijakan pertanian di ruang digital Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed-methods* dengan desain *sequential explanatory design* (Creswell & Plano Clark, 2017). Tahap pertama menganalisis wacana resmi pemerintah melalui Critical Discourse Analysis (CDA), sedangkan tahap kedua menganalisis respons publik melalui analisis sentimen dan analisis tematik. Integrasi ketiga analisis dilakukan pada tahap interpretasi untuk memahami dinamika interaksi antara pemerintah dan masyarakat di ruang digital.

Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara karena: (1) sektor pertanian merupakan sektor strategis yang menjadi prioritas pembangunan daerah; (2) wilayah ini merepresentasikan konteks Indonesia Timur yang masih minim dikaji dalam studi digital governance; (3) terdapat ekosistem digital lokal yang aktif dengan tingginya penggunaan media sosial oleh pemerintah dan masyarakat; serta (4) tersedia data digital yang terbuka dan memadai untuk dianalisis.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan data yang dikumpulkan selama April–September 2025, meliputi:

1. Data Primer, yang terdiri dari:
 - 18 video pidato Gubernur pada kanal YouTube resmi Pemprov Sultra dan Diskominfo Sultra;
 - Dokumen kebijakan (Perda dan Pergub bidang pertanian);
 - Posting media sosial resmi Gubernur dan Pemprov Sultra;
 - Wawancara semi-terstruktur dengan lima informan kunci, yaitu Kepala Dinas Pertanian, Kepala Diskominfo, dua staf perencana Dinas Pertanian, dan satu akademisi.

2. Data Sekunder, yang meliputi 1.845 komentar YouTube; 700 tanggapan Facebook dan Instagram; dan 300 komentar pada portal berita lokal.

Pemilihan video menggunakan *purposive sampling*, sedangkan komentar publik menggunakan total sampling. Pengumpulan data digital dilakukan melalui *web scraping* menggunakan *Python*.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan melalui tiga tahap:

1. *Critical Discourse Analysis (CDA)* (Fairclough, 2013), meliputi:
 - o Analisis tekstual terhadap kata kunci, metafora, dan *framing* kebijakan;
 - o Analisis praktik wacana untuk mengkaji produksi, distribusi, dan konsumsi teks;
 - o Analisis praktik sosial untuk mengidentifikasi relasi kekuasaan dan ideologi yang melatarbelakangi wacana.
2. Analisis Sentimen, dilakukan terhadap 2.845 komentar publik menggunakan Indonesian Sentiment Lexicon dan pustaka TextBlob yang diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia. Tahapan meliputi pra-pemrosesan data, pemberian skor sentimen, dan validasi manual oleh dua koder independen.
3. Analisis Tematik Induktif (Braun & Clarke, 2006), dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama respons publik, seperti kritik implementasi, apresiasi program, saran perbaikan, dan skeptisisme terhadap kebijakan.

Integrasi ketiga tahap analisis digunakan untuk memetakan hubungan antara wacana resmi pemerintah, respons afektif masyarakat, dan substansi partisipasi publik dalam ruang digital.

Validitas dan Reliabilitas

Keabsahan data dijaga melalui (1) triangulasi metode dan sumber data; (2) peer debriefing dengan dua ahli independen; dan (3) uji reliabilitas antar-koder dengan nilai di atas 0,80 serta validasi manual analisis sentimen yang menghasilkan tingkat akurasi sebesar 87%. Penelitian ini merupakan studi kasus kontekstual yang bertujuan memahami dinamika komunikasi kebijakan pertanian dan partisipasi digital di Sulawesi Tenggara, sehingga konsep yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi lensa analitis untuk diuji pada konteks daerah lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

a. Pola *Framing* dalam Wacana Resmi

Tabel 1. Distribusi Kata Kunci dalam Wacana Resmi (n=53 dokumen/video)

Pola Framing	Kata Kunci Contoh	Frekuensi Kemunculan	Persentase Dokumen
Teknokratis	modernisasi 4.0, efisiensi, optimasi, produktivitas	428	92%
Populis	kemandirian petani, kesejahteraan, pemberdayaan	367	78%
Kedaulatan Pangan	swasembada, prestasi pembangunan, identitas agraris	312	88%

Hasil identifikasi terhadap 35 dokumen kebijakan dan 18 video pidato Gubernur teridentifikasi tiga pola *framing* yang dominan. Frekuensi kemunculan istilah kunci per *framing* ditunjukkan pada tabel 1:

b. Distribusi Sentimen Respons Publik

Dari 2.845 komentar publik yang diidentifikasi, distribusi sentimen adalah sebagai berikut: 42% negatif (skor rata-rata -0.65), 35% positif (+0.82), dan 23% netral. Distribusi ini terkonsentrasi secara berbeda per platform:

Tabel 2. Distribusi Sentimen per Platform

Platform	Negatif	Positif	Netral	Total
YouTube	47% (716)	30% (457)	23% (351)	1,524
Facebook	38% (375)	40% (395)	22% (217)	987
Media Online	35% (117)	35% (117)	30% (100)	334
Total	42% (1.208)	35% (969)	23% (668)	2.845

Keterangan:

Skor sentimen rata-rata agregat: **-0.21** (kecenderungan negatif lemah)

c. Tema Respons Publik

Hasil identifikasi tematik terhadap korpus komentar menghasilkan empat tema utama dengan proporsi dan contoh *verbatim* sebagai berikut:

Tabel 3. Tema Respons Publik dan Karakteristiknya

Tema	Proporsi	Contoh Verbatim	Sentimen Dominan
Kritik Implementasi	28%	"Bantuan alat sampai ke kami sudah rusak, tapi di laporan dinyatakan lengkap."	Negatif (-0.72)
Apresiasi Program	25%	"Terima kasih pak Gubernur, berkat bantuan benih, panen tahun ini lebih baik."	Positif (+0.85)
Saran Perbaikan	22%	"Kalau bisa, pelatihan teknisnya jangan hanya sekali, tapi berkelanjutan sesuai musim tanam."	Netral (+0.18)
Skeptisisme	15%	"Programnya bagus di video, tapi realitanya di lapangan tidak pernah berubah."	Negatif (-0.68)

d. Respons Resmi

Dari 50 tanggapan resmi pemerintah yang teridentifikasi di kolom komentar, pola respons menunjukkan:

- 70% (35 tanggapan) ditujukan kepada pengguna dengan indikasi *elite lokal* (misalnya sebutan "Pak Kades", "Ketua Gapoktan").
- 80% (40 tanggapan) menanggapi komentar dengan muatan teknis-operasional atau apresiatif.
- 0% tanggapan yang secara substantif menanggapi komentar dengan kritik struktural (misal: soal kesenjangan akses, ketimpangan dalam program).

Pembahasan

Analisis terhadap wacana kebijakan pertanian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penelitian ini dilakukan menggunakan kerangka tiga dimensi Fairclough (2013). Dengan menggunakan pembedahan ketiga dimensi tersebut, hasil pembahasan dan analisis diuraikan sebagai berikut:

a. Tiga Pola *Framing* dalam Wacana Resmi

Analisis wacana kebijakan pertanian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengungkap tiga pola *framing* dominan yang berfungsi membentuk realitas kebijakan sekaligus mempengaruhi persepsi publik. Ketiga pola *framing* ini tidak hanya merepresentasikan pilihan bahasa, tetapi juga mengungkap ideologi dan kepentingan yang mendasari komunikasi kebijakan.

1). *Framing* Teknokratis

Framing teknokratis ditandai dengan penggunaan terminologi teknis-ilmiah yang menekankan rasionalitas dan efisiensi. Analisis mengidentifikasi penggunaan istilah-istilah seperti "modernisasi pertanian berbasis 4.0", "efisiensi produktivitas", dan "optimasi hasil" dalam 85% dokumen kebijakan dan 92% video pidato Gubernur. Metafora yang digunakan konsisten mengacu pada mesin dan sistem, seperti "revitalisasi sistem pertanian" dan "integrasi rantai nilai", yang menciptakan kesan bahwa pertanian adalah aktivitas teknis yang dapat dioptimalkan melalui intervensi teknologi.

Pola *framing* ini berfungsi mendepolitisasi kebijakan dengan menyajikannya sebagai keniscayaan teknis yang tidak terbantahkan, bukan sebagai pilihan politik yang mengandung konsekuensi distributif. Seperti dikemukakan oleh Fisher (2020), *framing* teknokratis cenderung mengaburkan dimensi ketimpangan dan konflik kepentingan yang melekat dalam kebijakan publik. Dalam konteks Sultra, *framing* ini efektif menciptakan citra pemerintah sebagai aktor rasional dan progresif, sambil mengesampingkan pertanyaan tentang keadilan sosial dan distribusi manfaat.

2). *Framing* Populis

Framing populis dimanifestasikan melalui penggunaan leksikon yang menekankan kedekatan dengan rakyat, seperti "kemandirian petani", "kesejahteraan bersama", dan "pemberdayaan masyarakat tani". Analisis menunjukkan bahwa frasa-frasa ini muncul dalam 78% konten komunikasi pemerintah, khususnya dalam konteks pengumuman program bantuan dan kunjungan kerja. Namun, pemeriksaan mendalam mengungkap ketidaksesuaian antara retorika dan realitas implementasi. Istilah-istilah populis tersebut sering kali tidak disertai definisi operasional yang jelas atau mekanisme pencapaian yang transparan. Pola ini mencerminkan apa yang dalam literatur terkini disebut sebagai "populisme teknokratis" - kombinasi antara retorika kerakyatan dengan agenda pembangunan yang bersifat teknis dan elitis (Beeson, 2023). Dalam konteks Sultra, *framing* populis berfungsi membangun legitimasi sosial dan kedekatan emosional, sambil mempertahankan kontrol substantif atas proses kebijakan.

3). *Framing* Kedaulatan Pangan

Framing kedaulatan pangan ditandai dengan penggunaan narasi "swasembada pangan" tidak hanya sebagai tujuan kebijakan, tetapi lebih sebagai simbol prestasi dan identitas regional. Analisis mengungkap bahwa *framing* ini muncul dalam 65% dokumen kebijakan dan 88% pidato Gubernur, dengan penekanan pada aspek simbolis seperti

"prestasi pembangunan" dan "identitas agraris Sultra". Framing ini menciptakan narasi heroik yang menyulitkan munculnya kritik substantif, karena mengkritik kebijakan dianggap sama dengan menentang "kedaulatan" dan "identitas" daerah. Seperti diidentifikasi oleh Clapp (2022), *framing* kedaulatan pangan sering digunakan pemerintah untuk membangun legitimasi politik, meskipun implementasinya mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kedaulatan pangan yang sesungguhnya. Dalam konteks Sultra, *framing* ini efektif menciptakan consensus semu sekitar kebijakan pertanian, sambil mengesampingkan pertanyaan tentang keberlanjutan ekologis dan keadilan distributif.

Ketiga pola *framing* tersebut tidak beroperasi secara terpisah, tetapi membentuk strategi komunikasi terintegrasi yang memperkuat hegemoni wacana pemerintah. *Framing* teknokratis memberikan legitimasi epistemik, *framing* populis memberikan legitimasi sosial, dan *framing* kedaulatan pangan memberikan legitimasi politik-budaya. Kombinasi ini menciptakan wacana yang tampak komprehensif dan legitimate, sambil membatasi ruang untuk kritik dan alternatif kebijakan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terbaru tentang komunikasi kebijakan di era digital (Schäfer, 2023) yang mengidentifikasi kecenderungan pemerintah menggunakan *multiple framing strategies* untuk mengkonsolidasikan dukungan publik. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi spesifik dengan menunjukkan bagaimana strategi tersebut dioperasionalkan dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia Timur, di mana keterbatasan kapasitas institusional justru diimbangi dengan kecanggihan strategi komunikasi.

b. Dinamika Produksi dan Konsumsi Wacana dalam Ekosistem Digital

Analisis praktik wacana mengungkap kompleksitas sirkulasi wacana kebijakan dalam ekosistem digital Sulawesi Tenggara, yang menunjukkan adanya ketegangan antara sentralisasi produksi wacana dan partisipasi kritis publik dalam konsumsinya.

1). Produksi Wacana yang Terpusat dan Hierarkis

Proses produksi wacana kebijakan pertanian di Sultra menunjukkan pola yang sangat terpusat dan hierarkis. Analisis terhadap 35 dokumen kebijakan dan 18 video pidato Gubernur mengungkap bahwa aktor utama dalam produksi wacana hampir secara eksklusif adalah Gubernur dan jajaran birokrasi tingkat atas. Proses perumusan narasi kebijakan dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan partisipasi substantif dari petani, kelompok tani, atau organisasi masyarakat sipil.

Berdasarkan wawancara dengan tiga orang pejabat dinas terkait, diketahui bahwa mekanisme perumusan kebijakan masih mengikuti pola tradisional "top-down", dimana konsep kebijakan dirumuskan di tingkat elite birokrasi kemudian "dijual" kepada publik melalui media digital. Temuan ini konsisten dengan penelitian Zhang & Chen (2023) tentang *governance* digital di negara berkembang, yang mengidentifikasi bahwa transformasi digital seringkali tidak diiringi transformasi dalam budaya birokrasi yang inklusif.

Implikasi dari sentralisasi ini adalah terbatasnya keberagaman perspektif dalam wacana kebijakan. Seperti diungkapkan oleh pejabat dinas pertanian: "Kami sudah memiliki blueprint pembangunan pertanian, tugas kami adalah menyosialisasikan program-program tersebut kepada masyarakat." Pernyataan ini merefleksikan mentalitas yang melihat publik sebagai objek kebijakan, bukan sebagai mitra dalam perumusan kebijakan.

2). Distribusi melalui Sistem Media Hibrid: Kontrol dalam Kemasan Keterbukaan

Pemerintah Sultra memanfaatkan strategi *hybrid media system* (Chadwick, 2017) dengan memadukan saluran komunikasi tradisional dan digital. Analisis menunjukkan penggunaan tiga saluran utama:

1. Saluran resmi (website pemerintah dan channel YouTube) untuk penyampaian pesan terstruktur
2. Media sosial (Facebook, Instagram) untuk engagement yang lebih personal
3. Media komersial lokal untuk memperluas jangkauan

Namun, paradox terlihat dalam praktik distribusi ini. Meskipun jangkauan narasi diperluas secara signifikan - dengan video pidato Gubernur mencapai 10,000-50,000 views per video - kontrol atas pesan inti tetap dipertahankan melalui berbagai mekanisme. Analisis konten menunjukkan bahwa 85% posting media sosial pemerintah bersifat one-way communication, hanya menginformasikan kebijakan tanpa membuka ruang dialog substantif.

Temuan ini memperkuat penelitian Hoffmann et al. (2023) tentang digital *governance* di Asia Tenggara, yang menemukan bahwa pemerintah sering menggunakan platform digital untuk "simulasi partisipasi" - menciptakan ilusi keterbukaan tanpa substansi dialog yang sebenarnya. Algoritma platform digital turut memperkuat kontrol ini dengan menciptakan "filter bubble" dimana pengguna terutama disugahi konten yang sejalan dengan narasi resmi.

3) Konsumsi Kritis oleh Publik: Dari Penerima Pasif menjadi Negosiator Aktif

Bertentangan dengan asumsi tentang publik pasif, analisis terhadap 2,845 komentar menunjukkan bahwa 65% publik merupakan konsumen kritis yang aktif terlibat dalam negosiasi makna terhadap wacana resmi. Temuan ini tidak hanya mengkonfirmasi tesis Svensson et al. (2015) tentang ruang digital sebagai arena kontestasi, tetapi memperluasnya dengan menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia Timur, kontestasi ini justru lebih hidup dan substantif daripada yang diasumsikan selama ini.

Analisis tematik mengungkap tiga pola konsumsi kritis, yakni: a) dekonstruksi narasi teknokratis melalui pengalaman empiris (35%); b) Negosiasi makna istilah-istilah populis dalam konteks lokal (28%); dan c) Resistensi terhadap *framing* heroik kedaulatan pangan (22%). Pola konsumsi kritis ini menunjukkan bahwa masyarakat Sultra bukanlah penerima pasif wacana resmi, melainkan aktor yang mampu membaca kritis antara retorika dan realitas. Seperti dikomentari seorang petani di kolom YouTube: "Katanya modernisasi, tapi alatnya datangnya musim kemarau, padahal butuh hujan."

c. Kekuasaan dan Ideologi dalam Praktik Sosial

Analisis pada level praktik sosial mengungkap bagaimana wacana kebijakan terhubung dengan struktur kekuasaan dan ideologi yang lebih luas.

1). Mekanisme Absorpsi Selektif: Politik Inkorporasi yang Asimetris

Mekanisme absorpsi selektif yang diidentifikasi dalam penelitian ini menunjukkan pola yang sistematis dalam merespons masukan publik. Berdasarkan analisis terhadap 50 interaksi resmi pemerintah di media sosial, teridentifikasi bahwa:

- 80% respons pemerintah diberikan kepada masukan teknis-operasional
- Hanya 15% respons yang menanggapi kritik implementasi
- 0% respons yang menanggapi kritik struktural atau fundamental

Pola ini menunjukkan bahwa pemerintah melakukan "politik inkorporasi asimetris" - mengadopsi masukan yang tidak mengganggu struktur kekuasaan existing, sementara

mengabaikan kritik yang bersifat fundamental. Temuan ini tidak hanya konsisten dengan teori policy feedback (Mettler & SoRelle, 2017), tetapi lebih jauh mengembangkan konsep cosmetic participation (Bächtiger & Parkinson, 2019) dengan mengidentifikasi mekanisme operasionalnya. Seperti diungkapkan dalam wawancara dengan staf humas Pemprov: "Kami menanggapi masukan yang membangun, bukan yang merusak." Pernyataan ini merefleksikan batasan yang ditetapkan pemerintah dalam memilah "masukan membangun" versus "kritik merusak".

2). Reproduksi Hierarki Digital: Migrasi Politik Patronase ke Ruang Digital

Analisis interaksi digital mengungkap bahwa 70% dari 50 tanggapan resmi pemerintah diberikan kepada komentar dari elite lokal (kepala desa, ketua kelompok tani, tokoh masyarakat). Pola ini menunjukkan reproduksi hierarki sosial-politik tradisional dalam ruang digital. Temuan ini memperluas penelitian Warburton & Aspinall (2019) dengan menunjukkan bahwa dalam konteks kebijakan sektoral seperti pertanian, hierarki tidak hanya direproduksi tetapi justru diperkuat oleh bias respons pemerintah. Analisis network interaksi menunjukkan terbentuknya "kelompok elite digital" yang terdiri dari aktor-aktor yang sudah memiliki posisi dalam struktur sosial-politik tradisional.

3). Ideologi Developmentalisme dan Teknosolusiisme: Hegemoni dalam Kemasan Modern

Wacana kebijakan pertanian Sultra didorong oleh ideologi developmentalisme dan teknosolusiisme yang kuat. Analisis mengungkap bahwa:

- 75% dokumen kebijakan menekankan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama
- 82% pidato Gubernur menonjolkan teknologi sebagai solusi utama
- Hanya 15% konten yang menyentuh aspek keadilan sosial dan distribusi manfaat

Orientasi ini mencerminkan bias teknokratis yang telah diidentifikasi Klerkx et al. (2019) dalam literatur pertanian digital, namun dalam konteks Indonesia Timur bias ini tampak lebih mencolok karena minimnya counter-narrative dari masyarakat sipil yang terorganisir. Hegemoni ideologi ini terlihat dari ketiadaan alternatif wacana yang substantif dalam ruang publik digital Sultra.

d. Dialog Semu: Cosmetic Participation dan Selective Absorption

Konvergensi analisis ketiga dimensi Fairclough mengungkap pola hubungan kompleks antara wacana resmi dan respons publik yang dapat dikarakterisasi sebagai "dialog semu".

1). Konvergensi Isu dan Divergensi Makna: Pertemuan yang Tidak Setara

Analisis menunjukkan adanya konvergensi dalam hal isu yang dibahas, namun divergensi tajam dalam interpretasi dan makna:

- *Framing* teknokratis pemerintah disambut dengan kritik implementasi (28%)
- *Framing* populis memicu apresiasi program (25%) dan skeptisisme (15%)
- *Framing* kedaulatan pangan direspons dengan saran perbaikan (22%)

Pola ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah dan publik membicarakan isu yang sama, makna yang dikonstruksi sangat berbeda. Publik menggunakan pengalaman empiris untuk mendekonstruksi narasi abstrak pemerintah, menciptakan apa yang dapat disebut sebagai "dialektika wacana" di ruang digital.

2). Mekanisme Dialog Semu: Dari Potensi Partisipasi ke Legitimasi Kosmetik

Interaksi antara wacana resmi dan respons publik lebih merepresentasikan cosmetic participation daripada dialog yang bermakna. Mekanisme absorpsi selektif berfungsi sebagai instrumen operasional yang mengubah potensi dialog menjadi dialog semu. Temuan ini memberikan kontribusi penting pada wacana digital governance dengan menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia Timur, cosmetic participation tidak hanya terjadi melalui minimnya keterlibatan, tetapi justru melalui keterlibatan yang tinggi yang kemudian disaring melalui mekanisme absorpsi selektif. Seperti diidentifikasi oleh Kim & Lee (2024) dalam studi terbaru tentang partisipasi digital di Asia, pola semacam ini merepresentasikan bentuk baru "authoritarian resilience" di era digital - dimana pemerintah memanfaatkan platform digital untuk menciptakan legitimasi tanpa harus melakukan redistribusi kekuasaan yang substantif.

e. Analisis Sentimen dan Tematik terhadap Respons Publik

1). Analisis Sentimen

Analisis sentimen terhadap 2.845 komentar menunjukkan distribusi: 42% negatif, 35% positif, dan 23% netral. Sentimen negatif terkonsentrasi pada tema kritik implementasi (skor rata-rata -0.65), sementara sentimen positif banyak muncul pada komentar apresiasi program (skor rata-rata +0.82). Validasi manual terhadap 20% sampel menunjukkan tingkat reliabilitas antar-coder sebesar 0.85. Hal ini berarti bahwa kebijakan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara dalam Bidang pertanian mayoritas dinilai masyarakat hanya bersifat politis, tidak menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

2). Analisis Tematik

Melalui analisis tematik, respons publik berhasil dikelompokkan ke dalam empat tema utama:

- Kritik Implementasi (28%). Tema ini didominasi keluhan tentang ketidakmerataan distribusi bantuan dan kompleksitas birokrasi. Seorang pengguna menulis, "Di desa kami, bantuan alat mesin pertanian hanya dinikmati kelompok tani tertentu yang dekat dengan aparat."
- Apresiasi Program (25%). Meskipun volumenya tinggi, apresiasi cenderung bersifat personal dan simbolis, merefleksikan budaya patronase dalam politik lokal di Indonesia Timur.
- Saran Perbaikan (22%). Tema ini merepresentasikan partisipasi substantif dengan saran-saran konkret berdasarkan pengalaman lokal, seperti saran untuk menyesuaikan program dengan kondisi lahan dan iklim setempat.
- Skeptisisme dan Resistensi (15%). Tema ini mengungkap ketidakpercayaan mendasar terhadap pemerintah, menunjukkan erosi trust yang dapat menghambat implementasi kebijakan.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kebijakan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara dalam bidang pertanian masih belum merata ke seluruh warga. Tidak semua masyarakat mendapatkan akses yang sama. Bantuan alat pertanian hanya dinikmati kalangan tertentu, dan sebagian masih sebatas wacana. Anggaran yang disiapkan masih sangat terbatas dibandingkan dengan beberapa aspek lain yg menjadi fokus pembangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penelitian ini menunjukkan bahwa ruang digital dalam komunikasi kebijakan pertanian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen demokratisasi kebijakan, melainkan lebih mereproduksi pola komunikasi instruktif yang telah lama mengakar dalam birokrasi. Meskipun ruang digital membuka peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, pengalaman, dan saran secara aktif, interaksi yang terjadi masih didominasi oleh produksi wacana yang bersifat top-down, mekanisme absorpsi selektif terhadap masukan publik, serta reproduksi hierarki sosial-politik di ranah digital. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dan masyarakat lebih merepresentasikan bentuk "dialog semu" (*cosmetic participation*), di mana partisipasi publik diakomodasi secara simbolik untuk membangun legitimasi kebijakan tanpa diikuti redistribusi kekuasaan dan perubahan substantif dalam proses perumusan kebijakan. Temuan ini menegaskan adanya ketegangan antara potensi demokratis ruang digital dan praktik digital reinforcement yang mempertahankan komunikasi satu arah, sehingga transformasi menuju tata kelola kebijakan pertanian yang partisipatif masih menjadi agenda yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara membangun mekanisme respons yang lebih inklusif terhadap masukan masyarakat, terutama terhadap kritik substantif dan usulan kebijakan yang bersumber dari pengalaman lokal petani, sehingga partisipasi publik tidak berhenti pada level simbolik (*cosmetic participation*). Selain itu, proses perumusan kebijakan pertanian perlu melibatkan aktor-aktor non-pemerintah, seperti petani, kelompok tani, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan studi dengan melakukan analisis komparatif antar daerah, menggunakan pendekatan longitudinal, serta menggabungkan data digital dengan observasi lapangan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika partisipasi publik dan transformasi tata kelola kebijakan di era digital.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan seluruh narasumber yang telah memberikan akses data serta informasi selama penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada *reviewer* dan editor jurnal atas masukan berharga yang telah meningkatkan kualitas naskah ini. Penelitian ini didukung secara institusional oleh Universitas Halu Oleo.

DAFTAR PUSTAKA

- Bächtiger, A., & Parkinson, J. (2019). Mapping and Measuring Deliberation: Towards a New Deliberative Quality. Oxford University Press.
- Beeson, M. (2023). The new techno-populism: Governing through digital platforms. *Policy Studies*, 44(2), 145-162.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.

- Bronson, K., & Knezevic, I. (2016). Big Data in food and agriculture. *Big Data & Society*, 3(1).
- Chadwick, A. (2017). *The hybrid media system: Politics and power*. Oxford University Press.
- Clapp, J. (2022). The problem with growing corporate concentration and power in the global food system. *Nature Food*, 3(5), 296-303.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2017). *Designing and conducting mixed methods research*. Sage publications.
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge.
- Eastwood, C. R., et al. (2019). Managing 'big data' in agriculture: Opportunities and challenges. *Agricultural Systems*, 176, 102646.
- Fairclough, N. (2013). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Routledge.
- Fisher, D. R. (2020). The broader importance of #FridaysForFuture. *Nature Climate Change*, 10(10), 895-896.
- (2020). The populist paradox: Interest in technocratic reforms and support for populist parties. *Environmental Politics*, 29(5), 903-925.
- Freelon, D. (2015). Discourse architecture, ideology, and democratic norms in online political discussion. *New Media & Society*, 17(5).
- Graham, T., et al. (2015). Between broadcasting political messages and interacting with voters. *Information, Communication & Society*, 18(4).
- Hoffmann, M., Tan, W. K., & Lee, S. Y. (2023). Digital governance and the illusion of participation: Evidence from Southeast Asia. *Journal of Information Technology & Politics*, 20(2), 145-163.
- Hutto, C., & Gilbert, E. (2014). VADER: A parsimonious rule-based model for sentiment analysis of social media text. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 8(1), 216-225.
- Johnson, M., & Brown, R. (2024). Blockchain for transparent governance: Applications in public participation. *Digital Government: Research and Practice*, 5(1), 1-15.
- Kim, J., & Lee, H. (2024). Authoritarian resilience in the digital age: Social media and political control in Southeast Asia. *Democratization*, 31(1), 78-96.
- Klerkx, L., et al. (2019). A review of social science on digital agriculture, smart farming, and agriculture 4.0. *Agricultural Systems*, 177.
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 365-383.
- Mettler, S., & SoRelle, M. (2017). Policy feedback theory. In *Theories of the policy process* (pp. 151-182). Routledge.
- Mergel, I. (2013). Social media adoption and resulting tactics in the U.S. federal government. *Government Information Quarterly*, 30(2), 123-130.
- Mitchell, R. (2018). *Web scraping with Python: Collecting more data from the modern web*. O'Reilly Media.
- Nurfadillah, et al. (2022). Digital participation of farmers in agricultural policy making: A case study from West Java. *Journal of Agricultural Extension*, 26(3), 45-58.

- Schäfer, M. S. (2023). Digital public sphere. In *The Routledge Handbook of Environment and Communication* (pp. 215-228). Routledge.
- Smith, P. (2023). Deliberative digital governance: Innovations in public participation. *Policy & Internet*, 15(3), 345-367.
- Svensson, J., Neumayer, C., Banfield-Mumb, A., & Schossboeck, J. (2015). Identity and anonymity in digital democracy: Comparing the use of different online tools in a participatory budgeting process. *Policy & Internet*, 7(3), 287-307.
- Taufiqurrahman, M. (2020). Social media and agricultural policy participation in South Sulawesi. *Indonesian Journal of Agricultural Studies*, 15(2), 112-125.
- Thelwall, M. (2017). Sentiment analysis for social media. In *The SAGE handbook of social media research methods* (pp. 545-558). Sage.
- Townsend, L., & Wallace, C. (2016). *Social media research: A guide to ethics*. University of Aberdeen, 1-16.
- Warburton, E., & Aspinall, E. (2019). Explaining Indonesia's Democratic Regression. *Asian Survey*, 59(6).
- Zhang, H., & Chen, L. (2023). Digital transformation without institutional change: The paradox of e-government in developing countries. *Government Information Quarterly*, 40(2), 101789.